

# MENGUKUR DERAJAT KEISLAMAN EKONOMI DAN FAKTOR PENDORONGNYA: STUDI KASUS PROVINSI DI INDONESIA

ALI RAMA

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

E-mail: rama@uinjkt.ac.id

## *Abstract*

*The study aims to rank the degree of economic Islamicity for all provinces in Indonesia using 'economic islamicity index'. Other than that, the study investigates the impacts of economic performances, market share of Islamic banking and human development to economic Islamicity performance. To achieve the purposes, the study employs index method, descriptif analisis, correlation and regression models. The study finds that Indonesia as Muslim majority population has lower degree of Islamicity, particularly in the aspect of economic Islamicity. The average performances of all provinces are in middle level which is ranging between 30-40 points. The result indicates that the overall performances of economic Islamicity for all provinces in Indonesia are relatively same, there is no significant gap between them. The statistical findings confirm that economic performances (economic growth and income per capita) and human development are statistically significant in affecting the index performances. Thus, economic and human development are among the keys achieving the purposes of the Islamic economic system.*

*Keywords: Economic Islamicity Index, Economic Justice, Economic Prosperity*

## PENDAHULUAN

Belakangan ini, Islam menjadi sorotan di mata dunia internasional. Sorotan yang lebih bernuansa negatif ini setidaknya dipicu oleh peristiwa penyerangan menara kembar WTC (World Trade Center) dan Pentagon di New York pada tahun 2001 atau biasa disebut tragedi 9/11 yang diduga melibatkan kelompok radikal Muslim, yaitu Al Qaidah. Kemunculan gerakan *Islamic State of Iraq and Syria* yang memproklamkan negara *khilafah* dengan jalan kekerasan juga turut memperbesar sentimen negatif terhadap Islam dan dunia Muslim pada umumnya. Padahal, mayoritas umat Islam mengecam peristiwa tersebut dan tidak mewakili ajaran

Islam yang sebenarnya. Pengikut terorisme yang berkembang di beberapa organisasi radikal Muslim menurut Askari (2017) sebagaimana ditulis di koran Huffington Post tahun 2017 hanya berjumlah sekitar 0.0001 persen dari total jumlah penduduk Muslim. Ini menunjukkan bahwa gerakan tersebut tidak mewakili kepercayaan dan tindakan Muslim secara keseluruhan. Askari (2017) mempertegas dengan mengatakan: *"Let's begin by clearing the dect – Islam is not the problem, but is instead the solution for a better future for Muslim countries. The fact is that Islam has been undermined and hijacked by corrupt hereditary rulers, clerics and strongman to 'legitimize' their illegitimate rule. And their illegitimate rule – with*

*its absence of the rule of law and representative government – has been supported by the Great Power, from the East and especially from the West.”*

Dengan demikian, tantangan bagi dunia Muslim khususnya terhadap negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim adalah bagaimana memahami nilai-nilai universal yang terkandung dalam Islam yang selanjutnya diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ekonomi, misalnya, ajaran Islam mempromosikan terciptanya pertumbuhan ekonomi berkualitas, pengurangan kemiskinan, distribusi kekayaan berkeadilan, penghormatan terhadap tenaga kerja, dan lain sebagainya. Harusnya, indikator-indikator tersebut harus tercermin secara kuantitatif di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim.

Fakta sebaliknya menunjukkan bahwa negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim terutama yang tergabung dalam keanggotaan OKI (Organisasi Konferensi Islam) justru tidak mengadopsi kebijakan ekonomi dan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Islam. Setidaknya hal ini terlihat di beberapa penelitian yang berusaha mengukur ‘derajat keIslaman ekonomi’ negara-negara Muslim, diantaranya misalnya Anto (2011) dan Rehman & Askari (2010) yang justru menempatkan negara-negara Muslim jauh lebih rendah peringkatnya dibandingkan dengan negara-negara non-Muslim.

Rehman & Askari (2010) dalam studinya tentang ‘*An Economic Islamicity Index*’ yang berusaha merangking ‘derajat keIslaman ekonomi’ negara-negara Muslim terutama berdasarkan pada 12 prinsip-prinsip dasar dari ekonomi Islam justru menemukan bahwa Irlandia sebagai peringkat pertama, Denmark dan Amerika Serikat masing-masing diurutan ke-2 dan ke-5 sebagai negara yang paling tinggi indikator keIslaman ekonominya. Sementara negara Muslim seperti Malaysia hanya menempati peringkat ke-33, tertinggi di antara negara Muslim lainnya, tetapi masih lebih rendah dari Israel (ke-27). Ironisnya, Indonesia sebagai negara Muslim terbesar dunia justru berada di urutan ke-104 (Rehman & Askari, 2010). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa negara-negara yang dianggap sebagai negara Muslim belum mengadopsi kebijakan ekonomi dan keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam (Rama, 2016).

Studi Rehman & Askari (2010) tentang indeks keIslaman ekonomi menuai kontroversi terutama pada aspek metodologi dan temuan yang dihasilnya. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur ‘derajat keIslaman ekonomi’ lebih bersifat indikator-indikator ekonomi dibandingkan dengan keIslaman itu sendiri. Kinerja indikator-indikator tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah masing-masing dan tidak ada

kaitannya dengan 'derajat keislaman'. Penulisnya sendiri menyadari bahwa proksi atau indikator yang digunakan tidaklah ideal merepresentasikan dari prinsip-prinsip Islam dalam bidang ekonomi, tetapi setidaknya hal ini menjadi langkah awal menemukan dan mengembangkan proksi yang lebih relevan.

Sebagai bentuk kritik sekaligus pengembangan dari konsep model Rehman dan Askari (2010), saat ini sudah terdapat beberapa studi tentang pengukuran 'derajat keislaman ekonomi' baik dalam bidang perbankan dan keuangan maupun bidang pembangunan manusia menggunakan konsep *maqashid syariah*, seperti Ali & Rama (2016), Anto (2011), Chapra (2008), dan Hasan & Syed (2014). Konsep ini dianggap lebih relevan dikarenakan didasarkan pada konsep yang lebih mahsyur di kalangan sarjana Muslim. Adanya studi yang beranekaragam dari segi konsep yang digunakan tentunya menjadi hal positif demi menemukan konsep yang lebih baik. Selain itu juga perlu dilakukan kajian empiris dengan menggunakan objek yang berbeda atau spesifik. Misalnya, konsep indeks tersebut digunakan untuk menilai wilayah-wilayah di negara-negara Muslim tertentu.

Rama (2016) melakukan pengukuran tingkat keislaman ekonomi provinsi di Indonesia dengan menggunakan model Rehman & Askari (2010). Metode yang digunakan dengan menggunakan pembobotan dalam konstruksi indeksnya.

Metode tersebut bisa menghasilkan hasil yang bias dan subjektif. Selain itu, penelitian tersebut menggunakan periode waktu hanya satu periode (2014) saja. Sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan peringkat akibat perubahan periode. Oleh karena itu, metode rata-rata lebih relevan untuk digunakan.

Di sisi lain, dibutuhkan sebuah studi empiris yang dapat memperkuat klaim bahwa Islam (perilaku berIslam) mendorong kinerja ekonomi. Studi empiris ini sebagai *counter* bagi kalangan yang menyalahkan Islam atas keterbelakangan (ekonomi) sebagian besar negara-negara Muslim. Dan juga *counter* bagi pengikut hipotesis sekularisme yang mengatakan semakin tinggi tingkat ekonomi, semakin rendah tingkat keberagamaan. Berdasarkan pada hal yang dikemukakan di atas, penelitian ini berusaha untuk mengukur 'derajat keislaman ekonomi' provinsi di Indonesia dengan model indeks keislaman ekonomi yang diperbaharui.

## TINJAUAN KEPUSTAKAAN

### Agama dan Aktivitas Ekonomi

Studi hubungan antara agama dengan aktivitas ekonomi memberikan perspektif tersendiri dalam membentuk teori ekonomi; bagaimana model ekonomi dapat dimodifikasi untuk menganalisis tingkat keyakinan (*beliefs*), norma (*norms*) dan nilai (*values*), dan eksplorasi bagaimana agama berdampak terhadap perilaku ekonomi dan aktivitas individu, kelompok dan

masyarakat. Dalam kajian literatur, studi hubungan antara agama dengan ekonomi terpolarisasi kepada dua pandangan, yaitu pihak yang melihat agama sebagai variabel *dependent* (Barro da McCleary, 2004; Nath, 2007; & Noland, 2005) dan yang melihatnya sebagai variabel *independent* (Barro & McCleary, 2003; Campante & Yanagizawa, 2015; Grier, 1997; dan Rama, 2013). Ketika agama dilihat sebagai variabel *dependent*, maka berimplikasi bahwa perkembangan ekonomi, seperti pendapatan, standar hidup, kebijakan pemerintah berdampak pada tingkat "keberagamaan" (*degree of religiosity*), seperti tingkat kehadiran di mesjid atau di gereja dan ritual agama lainnya. Artinya, tingkat ekonomi berkorelasi terhadap peningkatan atau penurunan tingkat keberagamaan masyarakat. Barro dan McCleary (2004), misalnya, menemukan bahwa kemajuan ekonomi justru menurunkan tingkat kehadiran pemeluk agama di gereja. Temuan ini memperkuat hipotesis sekularisasi. Sebaliknya, jika agama ditempatkan sebagai variabel *independent* maka tingkat "keberagamaan" akan berdampak pada ekonomi, seperti kinerja ekonomi, produktivitas, etika dan semangat kerja, dan sebagainya (Rama, 2016). Misalnya, tingkat partisipasi pada ritual formal agama dan nilai menurut Barro & McCleary (2004), Campante & Yanagizawa (2015) dan Grier (1997) menentukan karakter individu yang pada akhirnya berdampak kepada kinerja ekonomi,

seperti produktivitas. Pendekatan ini merupakan *counter* terhadap hipotesis sekular sebelumnya.

Dalam konteks ekonomi Islam, hubungan antara agama dengan aktivitas ekonomi tidak semata dilihat dalam perspektif hubungan antar variabel. Menurut Kahf (1999) agama dan ekonomi memiliki hubungan yang sangat erat. Agama diartikan sebagai sekumpulan kepercayaan dan keyakinan yang harus menuntun perilaku individu kepada Tuhan, sesama manusia dan dirinya sendiri. Salah satu domain agama, menurutnya, adalah perilaku manusia dalam setiap tingkatan dan aspek. Sementara ekonomi, lanjutnya, adalah studi tentang perilaku manusia dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian, perilaku ekonomi adalah merupakan salah satu domain yang menjadi konsen dari agama. Dengan demikian, Islam sebagai sebuah agama memiliki sekumpulan prinsip dan ketentuan yang menjadi petunjuk dalam menjalankan aktivitas ekonomi khususnya dalam pembentukan perilaku ekonomi baik dalam konsumsi, produksi maupun distribusi (Rama, 2015).

#### **Keislaman Ekonomi: Tinjauan Konsep Dasar**

Puncak utama dari ajaran Islam adalah terwujudnya kehidupan manusia yang penuh keberkahan (Chapra, 2008). Hal ini tercermin dari misi utama dikirimkannya Rasulullah di muka bumi ini (QS, 21:107). Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan

mempromosikan *falah*, yaitu kesuksesan/kebahagian di dunia dan di akhirat. Menurut Khan (1999:36), kondisi *falah* tercermin dalam 4 (empat) aspek utama, yaitu spiritual, ekonomi, budaya dan politik. Konsep *falah* merupakan konsep yang multidimensional, mencakup seluruh aspek kehidupan individu dan masyarakat. Oleh karena itu, menurut Chapra (2008), *falah* tidak hanya menjadi tujuan dari pada Islam tetapi menjadi keinginan dari individu dan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan ekonomi sepatutnya bertujuan mempromosikan tercapainya *falah* atau dengan kata lain kesejahteraan manusia (*human well-being*). Makna kesejahteraan manusia tidak sepatutnya direduksi hanya mencakup pada aspek materi semata tetapi juga perlu mencakup aspek non-materi. Sehingga mendapatkan kesejahteraan yang komprehensif sebagai tujuan utama dari pembangunan ekonomi.

Islam sebagai sebuah petunjuk hidup (*way of life*) memiliki sejumlah aturan yang dapat mengantarkan manusia pada kesejahteraannya. Bahkan menurut Rehman & Askari (2010) dan Matta (1997) Islam adalah agama yang memiliki aturan yang jelas (*a rules-based religion*). Pada bidang ekonomi, misalnya, Islam menyediakan garis petunjuk (*guidelines*) ekonomi yang detail untuk menciptakan sistem ekonomi yang sukses dan berkeadilan, seperti pelarangan riba, *maysir*, *gharar*, larangan menumpuk

kekayaan, perintah zakat dan sedekah, dan sejumlah aturan jelas lainnya. Berdasarkan pada sejumlah ketentuan dalam Al-Quran maupun Al Hadist maka dapat diturunkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh Islam dalam bidang ekonomi. Tujuan utama Islam dalam ekonomi adalah untuk kesejahteraan ekonomi dan kesamaan struktur sosial bagi masyarakat demi memaksimalkan kemampuan intelektual, melestarikan dan mengembangkan kekayaan, dan aktif berkontribusi dalam pengembangan ekonomi dan sosial dalam masyarakat. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi disertai keadilan sosial adalah fondasi dari sistem ekonomi Islam. Setiap individu dan pengambil kebijakan berkewajiban untuk mengembangkan berbagai cara dan strategi untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat menghambat perkembangan intelektual, kemajuan ekonomi, dan kebebasan sosial (Rehman & Askari, 2010). Dalam mencapai tujuan-tujuan Islam dalam bidang ekonomi tidak hanya mengandalkan peran individu dan kelompok masyarakat semata tetapi juga diperlukan peran aktif pemerintah dengan sumber daya ekonomi yang dimilikinya untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut. Peran pemerintah. Menurut Chapra (1998:10) dalam bidang ekonomi adalah: (1) untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan kondisi ekonomi yang *full employment* serta

pertumbuhan ekonomi yang tinggi, (2) untuk menjaga stabilitas mata uang, (3) penegakan hukum, (4) untuk memastikan keadilan sosial dan ekonomi, (5) untuk mengatur jaminan sosial dan mempercepat pemerataan dan distribusi pendapatan dan kekayaan, dan (6) untuk mengharmonisasikan hubungan internasional dan memperkuat pertahanan negara. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pengontrol dalam perekonomian tetapi sebagai pelaku utama yang dapat menggerakkan demi tercapainya tujuan-tujuan ekonomi (Rama, 2015:25). Selanjutnya, menurut Kahf (1991) peran negara dalam ekonomi diantaranya adalah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menjaga moral, kondisi ekonomi yang berkeadilan, peningkatan lapangan pekerjaan dan lingkungan yang seimbang.

Berdasarkan pada visi Islam dalam bidang ekonomi maka diharapkan solusi Islam berbeda dengan sistem ekonomi konvensional dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomi. Oleh karenanya, menurut Rehman & Askari (2010), sistem tersebut seharusnya menciptakan kinerja yang lebih baik; tingkat keadilan pada semua aspek pengelolaan ekonomi yang lebih tinggi, standar moral yang lebih tinggi, transparansi dan keterbukaan dalam semua jenis transaksi ekonomi, pengurangan kemiskinan, distribusi kekayaan dan pendapatan yang lebih merata, tidak ada eksploitasi dan penimbunan, tidak

ada spekulasi berlebihan, mengedepankan berbagi resiko dibandingkan kontrak berbasis utang, penguatan infrastruktur dan pelayanan sosial, penghormatan terhadap pekerja, alokasi anggaran untuk pengembangan pendidikan yang lebih baik, tabungan dan investasi yang tinggi, dan perlindungan dan pelestarian lingkungan. Capaian tujuan ekonomi Islam tersebut seharusnya tercermin secara empiris dalam berbagai indikator di negara-negara yang berbasis Muslim. Dalam artian bahwa prestasi tersebut tercermin secara kuantitatif dalam berbagai bidang kinerja ekonomi.

Indeks keIslaman ekonomi mengukur derajat kesesuaian terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam terhadap kebijakan (*policies*), capaian (*achievements*) dan fakta (*realities*) yang terjadi di negara-negara yang mendeklarasikan sebagai negara Islam. Konsep indeks keIslaman ekonomi (IKE) diperkenalkan oleh Rehman & Askari (2010) dalam studinya '*An Economic Islamicity Index*' di tahun 2010. Konsep IKE dikembangkan berdasarkan pada agregasi tiga tujuan utama sistem ekonomi Islam, yaitu (i) tercapainya keadilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan; (ii) meningkatnya kesejahteraan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan; dan (iii) adopsi penerapan ekonomi dan keuangan syariah (Rehman & Askari, 2010). Ketiga tujuan sistem ekonomi Islam tersebut selanjutnya diturunkan oleh (Rehman & Askari,

2010) ke dalam 11 (sebelas) prinsip dasar, yaitu (1) peluang ekonomi dan kebebasan ekonomi, (2) kesamaan akses pada pendidikan dan kesehatan, (3) penciptaan pekerjaan dan kesamaan akses pada pekerjaan, (4) hak kekayaan dan kontrak, (5) pencegahan korupsi, (6) pengurangan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, (7) perpajakan dan kesejahteraan sosial, (8) penguatan sistem keuangan, (9) penerapan sistem keuangan syariah, (10) kesejahteraan ekonomi dan (11) keadilan ekonomi. Selanjutnya, masing-masing prinsip dasar tersebut diderivasi ke indikator yang relevan dan terukur. Ilustrasi operasionalisasi indeks keIslaman ekonomi (IKE) dari tataran konsep sampai pada indikator-indikator terukur dapat dilihat pada Gambar 1.

Keunggulan sistem ekonomi Islam diharapkan tercermin pada angka kuantitatif dan kualitas pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi jika aturan dan tujuan Islam di adopsi dalam suatu perekonomian. Oleh karena itu dikembangkan alat ukur yang mengukur atau membandingkan ketercapaian dari tujuan-tujuan Islam dalam aspek ekonomi.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Ruang Lingkup**

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memeringkat tingkat 'derajat keIslaman ekonomi' di seluruh Indonesia dengan menggunakan metode indeks keIslaman ekonomi (IKE) yang

dikembangkan oleh Rehman & Askari (2010). Model IKE disesuaikan konteks perekonomian di Indonesia. Penelitian ini juga merupakan pengembangan dan perbaikan dari penelitian penulis sebelumnya (Rama, 2016) khususnya pada aspek metode pengukuran dan indikator yang digunakan. Output penelitian ini berupa peringkat indeks keIslaman ekonomi dari masing-masing provinsi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menampilkan pengaruh sejumlah variabel seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, rasio aset perbankan syariah dan pembangunan manusia terhadap kinerja indeks keIslaman ekonomi. Bagian ini akan mengidentifikasi variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kinerja indeks ke Islaman ekonomi.

### **Jenis dan Sumber Data**

Untuk mencapai tujuan penelitian, data sekunder berupa laporan kinerja keuangan yang dipublikasikan secara berkala oleh lembaga terkait, seperti Badan Pusat Statistik dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dari periode 2013-2017 digunakan sebagai dasar melakukan pengukuran dan peringkat indeks kinerja keIslaman ekonomi. Sampel penelitian adalah 33 provinsi dengan tidak memasukkan provinsi Kalimantan Utara dikarenakan ketidaklengkapan data yang tersedia. Provinsi dibagi menjadi 6 wilayah atau kepulauan, yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali & Nusa

Tenggara, dan Maluku & Papua. Periode masing indikator yang digunakan tidak seragam tetapi masih dalam rentang 2013-2017.

### Metode Penghitungan Indeks

Indeks keIslaman ekonomi merupakan hasil agregasi dari tiga tujuan utama dari sistem ekonomi Islam, yaitu (i) tercapainya keadilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; (ii) meningkatnya kesejahteraan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan; dan (iii) adopsi penerapan ekonomi dan keuangan syariah. Ketiga tujuan sistem ekonomi Islam tersebut selanjutnya diturunkan ke dalam 11 (sebelas) prinsip dasar, yaitu (1) peluang ekonomi dan kebebasan ekonomi, (2) kesamaan akses pada pendidikan dan kesehatan, (3) penciptaan pekerjaan dan kesamaan akses pada pekerjaan, (4) hak kekayaan dan kontrak, (5) pencegahan korupsi, (6) pengurangan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, (7) perpajakan dan kesejahteraan sosial, (8) penguatan sistem keuangan, (9) penerapan sistem keuangan syariah, (10) kesejahteraan ekonomi dan (11) keadilan ekonomi (Rehman & Askari, 2010).

Dalam menghitung indeks keIslaman ekonomi masing-masing provinsi di Indonesia, penelitian ini setidaknya melalui tiga tahap: *pertama*, data sekunder dari indikator yang digunakan sebagaimana pada tabel diindekskan atau diperingkat dengan menggunakan pendekatan

nilai minimum (*min*) dan maksimum (*maks*) untuk masing-masing provinsi. Formulasnya adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks} = \frac{\text{nilai aktual} - \text{nilai min}}{\text{nilai maks} - \text{nilai min}}$$

Nilai aktual adalah nilai yang terjadi pada data indikator di masing-masing provinsi. Sementara nilai *maks* dan *min* adalah nilai maksimum dan minimum pada data indikator di masing-masing provinsi di Indonesia. Semua data indikator yang didapatkan terlebih dahulu dilakukan normalisasi data terutama data yang bersifat negatif. Dalam melakukan normalisasi data, penelitian ini mengadopsi pendekatan yang digunakan oleh UNDP dalam membuat *Human Development Indeks*, yaitu pertama jika data indikatornya bersifat negatif maka formula normalisasi datanya dengan menggunakan formula  $(100 - \text{data indikator}) / 100$  dan atau dimana data rasio gini, inflasi dan pengangguran di hitung dalam persentase. Jika data tidak dalam bentuk persentase, yaitu antara 1 dan 100 tetapi dalam desimal maka formula normalisasinya menjadi  $1 - \text{data indikator}$ . Data bersifat negatif maksudnya adalah data yang menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai datanya maka semakin buruk kinerjanya.

*Kedua*, setelah melakukan indeksasi atau pemeringkatan pada tahap pertama, selanjutnya dilakukan indeksasi atau pemeringkatan pada tingkat elemen, yaitu 11 prinsip dasar ekonomi Islam sebagaimana tercantum pada tabel.

Metode yang digunakan pada tahap ini adalah metode rata-rata, yaitu mencari nilai-rata-rata dari indikator-indikator dimensi tersebut di masing-masing provinsi. Adapun contoh ilustrasinya adalah: salah satu prinsip dasar ekonomi Islam adalah menciptakan distribusi keadilan ekonomi. Untuk menghitung prinsip ini digunakan 3 indikator terukur, yaitu rasio gini, tingkat kedalaman kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan. Dengan demikian, cara menghitung indeksinya dengan pendekatan rata-rata adalah:

$$\text{Indeks} = \frac{(\text{Ukuran rasio} + \text{kedalaman kemiskinan} + \text{keparahan kemiskinan})}{3}$$

Ketiga, tahap terakhir adalah menghitung indeks keislaman ekonomi (IKE) masing-masing provinsi berdasarkan pada 11 elemen atau prinsip dasar ekonomi Islam yang digunakan dalam penelitian ini. Metode penghitungan yang digunakan pada tahap ini adalah rata-rata geometrik, yaitu nilai rata-rata geometrik dari ke 11 elemen atau prinsip dasar ekonomi Islam. Metode rata-rata geometrik merupakan metode yang umum dipakai dalam melakukan pemeringkatan, diantaranya digunakan oleh UNDP dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia. Formulasnya adalah sebagai berikut:

$$KE = \sqrt[11]{(E_1 \times E_2 \times E_3 \times E_4 \times E_5 \times E_6 \times E_7 \times E_8 \times E_9 \times E_{10} \times E_{11})} \times 100$$

Ket: E<sub>1-11</sub> adalah 11 elemen atau prinsip-prinsip dasar sebagaimana pada tabel. Dengan demikian, indeks keislaman ekonomi atau IKE merupakan nilai rata-rata geometrik dari 11

elemen atau prinsip dasar ekonomi Islam yang digunakan di penelitian ini. Metode penghitungan ini jauh berbeda dengan penelitian Rama (2016) yang juga menghitung indeks keislaman ekonomi tetapi menggunakan pembobotan untuk masing-masing tahap. Microsoft Excel digunakan dalam mengelola data penelitian. Program tersebut digunakan dalam melakukan normalisasi data dan pembentukan indeks. Begitupula dalam menampilkan hasil indeks dalam bentuk *bar chart*. Nilai skor indeks antara skala 1 sampai 100. Semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi kinerjanya, begitupula sebaliknya. Selanjutnya indeks dibaca dalam bentuk poin.

### Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan dua analisis, yaitu analisis deskriptif dan analisis regresi. *Pertama*, analisis deskriptif dilakukan terhadap hasil peringkat 'derajat keislaman ekonomi' masing-masing provinsi di Indonesia. Metode analisis yang digunakan atas indeks penelitian adalah deskriptif-eksploratif yaitu melakukan penguraian dan eksplorasi atas capaian indeks masing-masing provinsi beserta alasan-alasannya yang relevan. Metode deskriptif adalah upaya untuk menjelaskan atau mencatat kondisi atau sikap untuk menjelaskan menggambarkan atau menggambarkan apa yang terjadi saat ini. Sementara eksploratif adalah upaya untuk mendapatkan informasi tentang objek yang diteliti secara detail dan mendalam (Morissan,

2012). Analisis dimaksudkan untuk melakukan deskripsi terhadap peringkat yang dihasilkan dari metode indeks yang diadopsi. Sekaligus juga, metode ini digunakan untuk melakukan komparasi atas satu provinsi atau wilayah dengan provinsi atau wilayah lainnya.

*Kedua*, analisis regresi dilakukan untuk mengidentifikasi variabel yang berpengaruh terhadap kinerja indeks keIslaman ekonomi. Variabel *dependent* yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi ( $X_1$ ), tingkat pendapatan per kapita ( $X_2$ ), *market share* aset bank syariah ( $X_3$ ) dan Indeks Pembangunan Manusia ( $X_4$ ). Model persamaannya adalah sebagai berikut:

$$IKE = \beta_1 + \beta_2 X_1 + \beta_3 X_2 + \beta_4 X_3 + \beta_5 X_4$$

Selain itu, metode analisis korelasi juga dilakukan untuk melihat hubungan antara indeks keIslaman ekonomi dengan variabel-variabel *dependent* yang digunakan. Metode ini untuk memperkuat hasil dari analisis regresi. Software SPSS digunakan untuk menganalisis hubungan korelasi dan fungsional antar variabel dalam persamaan.

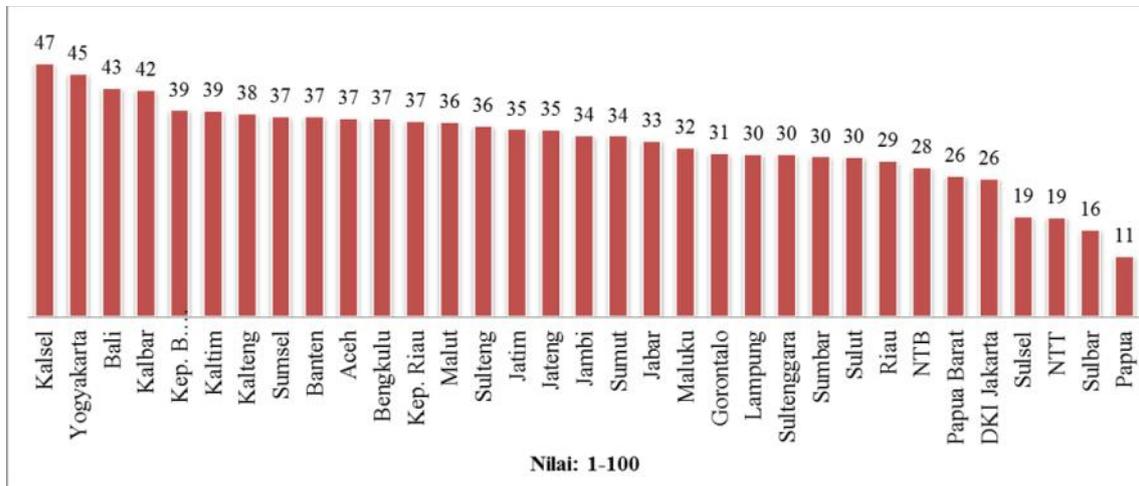
## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan utama penelitian ini adalah mengukur tingkat keIslaman Ekonomi dengan menggunakan konsep Indeks KeIslaman Ekonomi yang dikembangkan oleh Rehman & Askari (2010) dengan studi kasus seluruh provinsi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menampilkan analisis hubungan antara hasil IKE dengan

sejumlah variabel ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, aset perbankan syariah dan indeks pembangunan manusia dengan menggunakan metode analisis regresi dan korelasi. Indeks IKE diukur berdasarkan 11 elemen yang selanjutnya diturunkan menjadi indikator ekonomi yang relevan dan terukur.

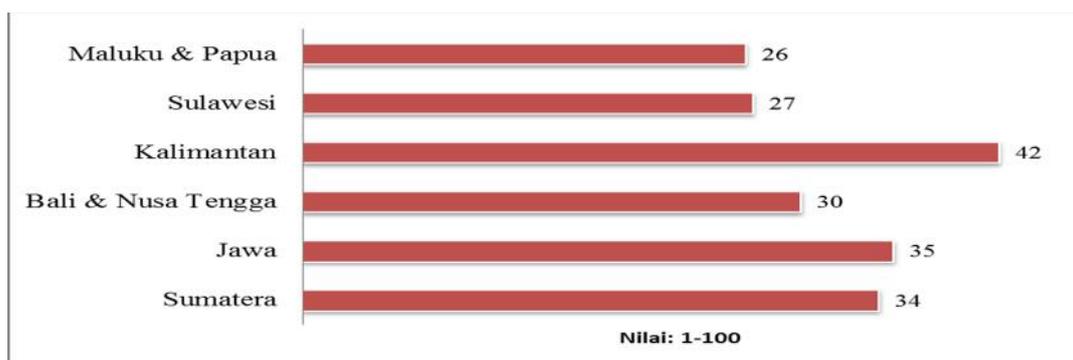
Hasil indeks IKE dapat dilihat pada Gambar 2. Gambar tersebut menampilkan nilai indeks IKE dengan skala 1 sampai 100 seluruh provinsi di Indonesia berdasarkan 29 proksi yang digunakan dalam penelitian. Provinsi Kalimantan Selatan, Yogyakarta, Bali dan Kalimantan Barat secara berurutan menempati peringkat tertinggi perolehan skor IKE dengan nilai masing-masing 47 poin, 45 poin, 43 poin dan 42 poin. Sebaliknya Papua, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan berurutan menempati peringkat terendah dengan nilai di bawah 20 poin. Selanjutnya, terdapat sekitar 21 provinsi yang memiliki nilai indeks antara 40-30 poin termasuk di dalamnya provinsi Aceh dengan nilai 37 poin, menempati rangking ke-10. Sementara itu DKI Jakarta sebagai ibukota negara dan pusat pemerintahan hanya berada pada urutan ke-26 dengan nilai indeks 26 poin. Terdapat sekitar 4 provinsi yang memiliki skor antara 30-20 poin. Dengan demikian, secara rata-rata nilai skor IKE seluruh provinsi di Indonesia antara 40-30 poin. Bahkan tidak ada provinsi yang memiliki nilai di atas 50 poin.

Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata kinerja ekonomi seluruh provinsi di Indonesia berkinerja rendah dalam hal pencapaian terhadap tujuan yang ingin dicapai dari sistem ekonomi Islam. Mayoritasnya memiliki derajat keislaman ekonomi yang rendah.



Gambar 1. Nilai Indeks Keislaman Ekonomi Provinsi di Indonesia

Provinsi Bali yang berpenduduk mayoritas non-Muslim justru memiliki peringkat kinerja IKE yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang berpenduduk mayoritas Muslim, seperti Aceh, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Hal ini menunjukkan bahwa 'derajat keislaman ekonomi' tidak dipengaruhi sepenuhnya oleh status agama penduduknya.



Gambar 2. Nilai Indeks Keislaman Ekonomi antar Pulau di Indonesia

Gambar 2 menampilkan nilai rata-rata IKE berdasarkan pembagian wilayah di Indonesia. Gambar tersebut menunjukkan bahwa rata-rata nilai skor IKE pulau Kalimantan menempati peringkat tertinggi di bandingkan dengan wilayah lainnya di Indonesia. Dengan demikian, wilayah Kalimantan memiliki kinerja ekonomi secara rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya dalam hal pencapaian tujuan ekonomi yang diinginkan oleh sistem ekonomi

Islam. Sementara wilayah Maluku & Papua dan Sulawesi menempati peringkat terendah di antara wilayah lainnya. Selanjutnya wilayah Jawa, Sumatera dan Bali & Nusa Tenggara berada pada nilai rata-rata sedang, yaitu antara 30-35 poin. Hasil uji korelasi antara IKE dengan sejumlah variabel seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, asset perbankan syariah (rasio DPK), pendapatan per kapita dan indeks pembangunan manusia ditampilkan pada tabel. Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa variabel IPM berhubungan signifikan positif dengan indeks keIslaman ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa aspek pembangunan manusia memiliki peran signifikan dalam hal peningkatan kinerja ekonomi yang sejalan dengan tujuan dari sistem ekonomi Islam. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi, tingkat pendapatan per kapita dan asset perbankan syariah tidak memiliki hubungan signifikan terhadap kinerja indeks.

**Tabel 1. Hasil Uji Korelasi**

		IKE	Pertumb Ekonomi	Rasio DPKiB	Pendapatan per Kapita	IPM
IKE	Pearson Correlation	1	-,321	,146	-,070	,436*
	Sig. (2-tailed)		,068	,424	,700	,011
	N	33	33	32	33	33
Pertumbuhan Ekonomi	Pearson Correlation	-,321	1	-,383*	-,379*	-,271
	Sig. (2-tailed)	,068		,031	,030	,128
	N	33	33	32	33	33
Rasio DPK iB	Pearson Correlation	,146	-,383*	1	-,105	,074
	Sig. (2-tailed)	,424	,031		,567	,686
	N	32	32	32	32	32
Pendapatan perKapita	Pearson Correlation	-,070	-,379*	-,105	1	,620**
	Sig. (2-tailed)	,700	,030	,567		,000
	N	33	33	32	33	33
IPM	Pearson Correlation	,436*	-,271	,074	,620**	1
	Sig. (2-tailed)	,011	,128	,686	,000	
	N	33	33	32	33	33

Tabel menampilkan hasil uji regresi antara pertumbuhan ekonomi, tingkat pendapatan per kapita, asset perbankan syariah, dan indeks pembangunan manusia terhadap IKE. Hasil uji regresi tersebut relatif berbeda dengan hasil uji korelasi sebelumnya. Tingkat pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita dan indeks pembangunan manusia ditemukan berpengaruh secara statistik terhadap kinerja indeks keIslaman ekonomi. Hasil ini mengindikasikan bahwa sektor kinerja ekonomi terutama pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan per kapita punya peran penting dalam kinerja indeks keIslaman ekonomi. Begitupula dengan faktor pembangunan manusia secara statistik ditemukan berpengaruh secara positif signifikan terhadap peningkatan kinerja indeks keIslaman ekonomi.

Porsi dana pihak ketiga pada sistem perbankan syariah ditemukan tidak berpengaruh secara statistik terhadap nilai indeks keIslaman ekonomi.

Temuan tentunya menunjukkan bahwa sektor perbankan syariah khususnya pada porsi pengumpulan dana masyarakat (DPK) tidak menjadi penggerak dalam peningkatan kinerja indeks keislaman ekonomi. Temuan tidak signifikan ini kemungkinan disebabkan karena porsi DPK bank syariah dibandingkan dengan total DPK bank konvensional masih sangat kecil. Hal ini tentunya berdampak pada nilai kontribusinya juga yang tidak signifikan terhadap kinerja ekonomi.

**Tabel 2. Hasil Uji Korelasi**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	-65,197	25,196			-2,588	,015
Pertumbuhan Ekonomi	-2,034	,729	-,454		-2,791	,010
Rasio DPK iB	-24,218	22,706	-,164		-1,067	,296
PendapatanperKapita	,000	,000	-,743		-3,931	,001
IPM	1,720	,379	,790		4,539	,000

Untuk melihat pengaruh keseluruhan dari tingkat pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, porsi aset bank syariah dan IPM terhadap kinerja indeks (IKE) dapat dilihat pada tabel. Hasil Uji F menunjukkan bahwa seluruh variabel yang dimasukkan di model persamaan, yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat pendapatan per kapita, aset bank syariah dan IPM memiliki pengaruh secara simultan terhadap kinerja indeks keislaman ekonomi.

**Tabel 3. Hasil Uji F**

Model	Sum of Squares	Mean Square	F	Sig.
Regression	1071,797	267,949	7,203	,000 <sup>b</sup>
Residual	1004,442	37,202		
Total	2076,238			

Nilai R-Square pada tabel menunjukkan bahwa terdapat sekitar 52 persen dari variabel *independent* (pertumbuhan ekonomi, tingkat pendapatan per kapita, aset porsi aset bank syariah dan IPM) berpengaruh terhadap kinerja indeks. Dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.

**Tabel 4. Hasil Uji R-Square**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,718 <sup>a</sup>	,516	,445	6,09931

## KESIMPULAN

Berdasarkan pada model indeks keislaman ekonomi yang diadaptasi dari Rehman & Askari (2010) penelitian menemukan bahwa 'derajat keislaman ekonomi' di Indonesia masih relatif rendah. Hal ini terlihat pada nilai indeks kinerja IKE seluruh provinsi di Indonesia yang ada dikisaran 35 poin. Tidak terdapat satu provinsi pun yang memiliki nilai indeks di atas 50 poin dari skala 1 sampai 100. Indonesia dengan penduduk Muslim mayoritas belum diikuti 'derajat keislaman' yang tinggi setidaknya pada aspek 'keislaman ekonomi'.

Penelitian ini menemukan bahwa provinsi Kalimantan Selatan, Yogyakarta, Bali dan Kalimantan Barat secara berurutan menempati posisi teratas dalam peringkat indeks keislaman ekonomi. Sebaliknya, provinsi Papua, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan secara berurutan menempati urutan terendah dalam pencapaian kinerja tujuan ekonomi Islam. Secara rata-rata mayoritas

provinsi di Indonesia berada di level menengah, yaitu antara 40-30 poin. Ini mengindikasikan bahwa secara rata-rata kinerja keIslaman ekonomi seluruh provinsi di Indonesia relatif sama, tidak terdapat provinsi yang terlalu besar jaraknya dibandingkan dengan provinsi lainnya. Dalam artian, tidak terdapat provinsi yang terlalu jauh 'derajat keIslaman ekonominya'.

Provinsi Aceh sebagai provinsi yang secara formal menerapkan hukum-hukum Islam justru memiliki kinerja indeks keIslaman ekonomi lebih rendah (beradap pada peringkat ke-10) dibandingkan dengan provinsi Bali (berada pada peringkat ke-3) yang notabene berpenduduk mayoritas non-Muslim. Temuan ini tentunya mengkonfirmasi bahwa kinerja keIslaman ekonomi tidak ditentukan oleh status keagamaan penduduknya. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa 'derajat keIslaman ekonomi' dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan per kapita dan indeks pembangunan manusia. Dengan demikian, pembangunan ekonomi dan manusia menjadi salah satu kunci utama dalam peningkatan pencapaian tujuan ekonomi dari sistem ekonomi Islam.

Berdasarkan pada temuan-temuan yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa provinsi-provinsi di Indonesia masih relatif rendah dalam hal pembangunan ekonomi. Hal ini tentunya bukan menjadi kesalahan dari agama tetapi menjadi kelemahan dari pemerintah

dari masing-masing provinsi tersebut. Statemen ini sejalan dengan ungkapan Rehman & Askari (2010) yang menemukan bahwa negara-negara yang mendeklarasikan dirinya sebagai negara Muslim justru memiliki peringkat indeks keIslaman ekonomi yang rendah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan penguatan terhadap 29 indikator atau proksi yang menjadi pembentuk dari indeks keIslaman ekonomi yang dikembangkan dalam penelitian ini agar 'derajat keIslaman ekonomi' dapat meningkat.

Tentunya penelitian ini perlu menekankan bahwa indikator atau proksi yang digunakan dalam penelitian ini perlu dikritisi dan dikembangkan secara terus-menerus demi memperbaiki model yang digunakan. Penelitian ini merupakan perbaikan dan pengembangan dari penelitian penulis sebelumnya (Rama, 2016). Penelitian-penelitian serupa di masa depan direkomendasikan untuk melakukan pengembangan konsep indeks yang didasarkan pada *maqashid syariah*, misalnya konsep ini dianggap lebih komprehensif dalam menurunkan tujuan utama yang ingin dicapai dari sistem ekonomi Islam itu sendiri. Tentunya juga diharapkan di masa datang terdapat sebuah indeks yang mengukur tingkat keIslaman ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia dan dipublikasikan secara berkala yang nantinya menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. H., & Rama, A. (2016). Peringkat Kinerja Lembaga Keuangan Syariah Berdasarkan Maqashid Syariah. *Dialog*, 39(2): 139-154.
- Anto, M. B. H. (2011). Introducing an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development in OIC Countries. *Islamic Economic Studies*, 19(2): 69-95.
- Askari, H. (2017). *Islamicity Indices-The Best Instrument for Changing the Muslim World*. Huffington Post.
- Barro, R. J., & McCleary, R. M. (2003). Religion and Economic Growth across Countries. *American Sociological Review*, 68 (5): 760-781.
- Barro, R. J., & McCleary, R. M. (2004). Religion and Economic Growth. *Milken Institute Review*, (Second Quarter 2004): 36-45.
- Campante, F., & Yanagizawa-Drott, D. (2015). Does Religion Affect Economic Growth and Happiness? Evidence from Ramadan. *Quarterly Journal of Economics*, 130 (2): 615-658.
- Chapra, U. (1998). *The Islamic Welfare State and its Role in the Economy*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Chapra, U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al Shariah*. IDB.
- Grier, R. (1997). The Effect of Religion on Economic Development: A Cross National Study of 63 Former Colonies. *Kyklos*, 50 (1): 47-62.
- Kahf, M. (1991). *The Economic Role of State in Islam*. Kuala Lumpur: CERT Publication.
- Kahf, M. (1999). *Islamic Economic System - A Review*. In *An Introduction to Islamic Economics*. New Delhi: Kitab Bhavan.
- Khan, M. A. (1999). *An Introduction to Islamic Economics*. New Delhi: Kitab Bhavan.
- Matta, A. (1997). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. In *Wawasan Islam dan Ekonomi: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: FE UI Press.
- Morissan. (2012). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana.
- Noland, M. (2005). Religion and Economic Performance. *World Development*, 33(8): 1215-1232.
- Rama, A. (2013). Perbankan Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Signifikan*, 2(1): 33-56.
- Rama, A. (2015). *Sistem Ekonomi dan Keuangan Islam*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rama, A. (2016). Konstruksi Indeks Keislaman Ekonomi dan Kajian Empirisnya di Indonesia. *Jurnal Bimas Islam*, 9(3): 557-594.
- Rehman, S. S., & Askari, H. (2010). An Economic Islamicity Index (EI2). *Global Economy Journal*, 10(3).